

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini telah terjadi tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dalam pengelolaan keuangan, sehingga mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat yang akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Siwambudi dkk, 2017).

Perubahan pengelolaan keuangan daerah sudah terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut adalah rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan *good governance*. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan demikian

akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stanburry, 1984). Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang di gunakan oleh entitas terkhusus pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Menurut pandangan masyarakat daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk mengetahui pemerintahan itu berjalan baik atau tidak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan memenuhi karakteristik tersebut dalam laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan maka pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Syarat terpenuhinya laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah berkualitas atau memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan salah satunya dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pada tahun 2019 jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) adalah sebanyak 486 atau setara dengan 89,7 persen dari 542 LKPD. Menurut BPK RI, Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) harus memenuhi empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Aditya, 2020).

Hasil pemeriksaan BPK-RI mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dicapai seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dicapai oleh 364 dari 415 pemerintah kabupaten, dan 87 dari 93 pemerintah kota (Ketua BPK Agung Firman Sampurna, 2020).

**Tabel 1.1**  
**Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)**  
**93 Pemerintah Kota di Indonesia**

<b>Opini BPK</b>	<b>Jumlah LKPD</b>
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	87
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	6

Sumber : (*bpk.go.id*).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meskipun Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK), bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Terdapat permasalahan yang terjadi

antara lain badan pemeriksa keuangan (BPK) menemukan beberapa catatan atas kepatuhan terhadap aturan dan sistem pengendalian internal seperti penataan dan pengamanan aset tetap, ketertiban administrasi atas penggunaan dana BOS, pengelolaan pajak daerah, hibah serta bantuan sosial yang kurang tertib. Hasil pemeriksaan atas LKPD pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan terdapat 6.160 kasus yang memuat 10.499 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Idris, 2019).

Berdasarkan kondisi yang terjadi, bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. Dapat diketahui jika pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Setyowati, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan Rahmawati (2018) menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi hasil penelitian Fauziah (2019) menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Menurut Setyowati (2016) Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah. Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerinah keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Untary (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia yang terlihat dari kemampuan dan keterampilannya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Taman (2017) dan Sudiarti (2020) bahwa Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut Sanjaya (2017) dan Siwambudi (2017) Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.



Selain Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, faktor lainnya yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dimana sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan kualitas laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses dalam laporan keuangan. Dalam penelitian Untary (2015) menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar mendapat opini yang baik dan tanpa kecuali. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahmawati (2018), Siwambudi (2017) dan Sanjaya (2017) yang menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Mokoginta (2017) dan Yuliani (2016) Sistem Pengendalian Itern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian**

## **Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Semarang)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut bahwa kondisi yang terjadi saat ini sistem pengendalian internal pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. Dapat diketahui jika pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria karakteristik kualitatif. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan dan adanya ketidaksamaan hasil penelitian antara peneliti terdahulu yang mengacu pada variabel tersebut, maka munculah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
4. Untuk menganalisis pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.



- b. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis persoalan penerapan teori yang diperoleh di saat perkuliahan dengan praktik nyata, khususnya dalam akuntansi sektor publik.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
- d. Bagi pemerintah daerah, dapat memberikan bahan masukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas serta memberikan wawasan mengenai pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **1.5 Sitematika Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan sumber-sumber literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu

yang ada hubungannya dengan penelitian, kerangka dan hipotesa penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan mengenai penelitian secara keseluruhan dan saran untuk meningkatkan serta memperbaiki penelitian selanjutnya.

